

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan nasional memegang peran sentral dalam agenda kebijakan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, sektor ekonomi menjadi fokus utama, dengan perhatian yang signifikan pada peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Pentingnya pembangunan ekonomi semakin terwujud dalam era otonomi daerah, di mana tanggung jawab tidak hanya terletak pada pemerintah pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang inklusif, memastikan bahwa setiap wilayah dapat turut serta dalam mewujudkan pembangunan nasional secara merata dan berkelanjutan (Pambudi & Hidayat, 2022).

Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah Indonesia mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi di wilayahnya. Undang-Undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik khas setiap daerah. Hal ini mencakup identifikasi dan pemanfaatan sumber daya lokal, pengembangan sektor-sektor unggulan, serta penciptaan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut tidak hanya memberikan autonomi kepada pemerintah daerah, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan konteks dan potensi masing-masing daerah di Indonesia (Anggaran, 2017).

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi fokus utama,

memberikan peluang kerja dan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah serta masyarakat lokal. Dengan penyediaan modal, pelatihan, dan pengembangan pasar, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor UKM. Strategi kreatif, seperti promosi produk lokal melalui platform digital dan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, dapat menjadi langkah inovatif untuk memajukan UKM. Dengan memaksimalkan potensi UKM, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Setyorini et al., 2019).

Oleh karena itu, pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, harus mengambil langkah strategis dalam mendorong pengembangan UKM melalui kebijakan, program, dan dukungan yang tepat. Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan UKM harus dilakukan secara inovatif dan kreatif, dengan mempertimbangkan potensi lokal, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UKM, dan merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan daya saing UKM di daerah tersebut.

Agustin (2020) menjelaskan bahwa perbedaan antara UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) melibatkan sejumlah aspek yang kompleks dan beragam. Secara umum, istilah UKM mengacu pada unit usaha yang mencakup skala yang lebih besar dan beragam, sementara UMKM lebih khusus menitikberatkan pada usaha mikro, yang umumnya memiliki skala lebih kecil dan terlibat dalam aktivitas ekonomi yang lebih lokal. Pemilihan istilah ini sering bergantung pada konteks literatur dan peraturan pemerintah yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Pembinaan dan pemberdayaan ketiga jenis usaha ini juga dikelola oleh entitas yang berbeda sesuai dengan regulasi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan ini menjadi esensial dalam merancang kebijakan dan program pembinaan yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM, UKM, dan usaha mikro di berbagai tingkatan ekonomi.

Dalam ranah yuridis formal, perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah tampak pada status badan hukum yang mengharuskan usaha kecil dan menengah untuk mempunyai badan hukum, berbeda dengan usaha mikro yang sering tidak memiliki badan hukum. Terdapat kriteria UMKM yang dapat dijelaskan melalui empat aspek utama, yaitu kekayaan bersih, omzet usaha, jumlah karyawan, dan total aset. Setiap kategori memiliki batasan yang spesifik, seperti kekayaan bersih maksimal Rp50 juta untuk usaha mikro, batas omzet maksimal Rp300 juta, dan jumlah karyawan kurang dari 30 orang sesuai dengan ketentuan Bank Dunia. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perbedaan status badan hukum dan parameter ekonomi yang mengatur UMKM menjadi esensial dalam perancangan kebijakan dan inisiatif pendukung guna mendorong pertumbuhan serta keberlanjutan sektor UMKM di tingkat nasional maupun lokal.

Dengan jumlah unit UMKM nasional yang mencapai 64,2 juta, sektor ini memiliki dampak strategis terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan pelaku usaha di sektor UMKM, yang signifikan dibandingkan dengan usaha berskala besar, dianggap memiliki dampak positif terhadap kemajuan bangsa. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi akuntansi online, menjadi esensial. Aplikasi semacam Jurnal dapat membantu dalam pengelolaan keuangan bisnis UMKM dengan efisien, menawarkan fitur seperti laporan keuangan, persediaan barang, dan pencatatan faktur. Kesadaran akan peran teknologi ini dapat memberikan dorongan signifikan dalam meningkatkan daya saing sektor UMKM

Dalam lingkup perkotaan, perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan memajukan pendapatan kota. Oleh karena itu, pemerintah setempat harus memberikan perhatian serius terhadap peningkatan UKM dan menerapkan strategi yang tepat guna memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan fokus pada desain dan implementasi strategi yang efektif, termasuk pemberian akses modal, pelatihan, fasilitas infrastruktur yang mendukung, serta kebijakan yang menggalakkan pertumbuhan UKM, pemerintah kota dapat memastikan keberhasilan pengembangan UKM yang tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomi, tetapi juga secara

langsung meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Pembangunan usaha kecil menengah (UKM) telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat sektor ekonomi. UKM dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi terutama pada penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan tingkat pengangguran (Permana, 2017). Di Kota Malang, yang merupakan salah satu kota terkemuka di Jawa Timur, sektor UKM juga diidentifikasi memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan UKM di Kota Malang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan keberagaman ekonomi, dan meningkatkan ketahanan ekonomi kota terhadap tantangan luar. Melalui kebijakan yang terfokus dan dukungan yang terstruktur, pemerintah Kota Malang dapat merancang dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sektor UKM, menciptakan lingkungan usaha yang mendukung, dan pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara menyeluruh di wilayah tersebut (Sjakoer et al., 2022).

Kota Malang menonjol dengan beragam sektor usaha UKM, mencakup industri kerajinan, kuliner, pariwisata, pakaian, dan jasa. Keberagaman ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari yang berskala mikro hingga menengah. Di sektor-sektor ini, UKM memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Malang. Selain menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi penduduk lokal, UKM juga memberikan kontribusi penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Industri kerajinan lokal, kegiatan kuliner, destinasi pariwisata, produksi pakaian, dan jasa-jasa lokal merupakan elemen-elemen utama yang membentuk ekosistem UKM di Kota Malang. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah setempat dan berbagai pemangku kepentingan, potensi sektor UKM ini dapat dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kota (Iqbal & Kurniawan, 2017).

Dalam konteks keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang,

terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi secara serius. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, UKM sering mengalami kendala dalam hal permodalan yang terbatas, pemasaran yang kurang efektif, dan pengelolaan yang belum mencapai tingkat profesionalitas yang optimal. Keterbatasan akses terhadap modal yang memadai menjadi hambatan bagi UKM dalam mengembangkan dan memperluas usahanya. Di samping itu, strategi pemasaran yang kurang optimal juga menyulitkan dalam meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk UKM di pasar. Selain itu, pengetahuan dan keterampilan manajemen yang terbatas pada pelaku UKM juga menjadi tantangan dalam mengelola usaha secara efisien dan efektif (Wardani et al., 2016).

**Tabel 1. 1 Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Malang Tahun 2022**

Kecamatan di Kota Malang	2022					
	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Fashion Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Otomotif Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pendidikan Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pertanian Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)
Kedungkandang	91	904	1 069	40	4	30
Sukun	93	1 330	1 478	40	6	9
Klojen	70	778	875	22	3	2
Blimbing	91	1 346	1 479	30	4	8
Lowokwaru	109	2 845	3 019	47	9	9
<b>KOTA MALANG</b>	<b>454</b>	<b>7 203</b>	<b>7 920</b>	<b>179</b>	<b>26</b>	<b>58</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, (2022)*

Berdasarkan data yang disajikan, terdapat enam kecamatan di Kota Malang, yaitu Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Kota Malang. Data tersebut menunjukkan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di setiap kecamatan berdasarkan sektor bisnis yang meliputi fashion, kuliner, otomotif, pendidikan, dan pertanian. Dari data tersebut, terlihat bahwa Kota Malang memiliki jumlah UMKM yang signifikan di setiap sektor bisnis. Sektor kuliner dan fashion menunjukkan jumlah UMKM yang paling tinggi di seluruh kecamatan, sementara sektor otomotif, pendidikan, dan pertanian juga memiliki kehadiran UMKM, meskipun jumlahnya relatif lebih rendah.

Mengamati potensi yang terkandung dalam sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang, merupakan langkah penting untuk melakukan penelitian

yang mendalam dan menganalisis strategi pengembangan yang efektif guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UKM di wilayah tersebut. Dalam rangka ini, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran yang sangat signifikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merancang serta melaksanakan langkah-langkah konkret untuk memajukan sektor UKM. Penelitian mendalam ini perlu mencakup identifikasi potensi dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UKM di Kota Malang, analisis tren pasar lokal dan global, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan dari pelaku UKM itu sendiri. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian tersebut, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dapat merumuskan strategi yang tepat dan dukungan yang spesifik, seperti penyediaan pelatihan keterampilan, akses ke modal, serta promosi dan pemasaran produk UKM secara efektif.

Dalam upaya pengembangan UKM di Kota Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara aktif berpartisipasi dalam Riset Transformasi Digital Indonesia (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2023 yang diinisiasi oleh Smart City and Community Innovation Center (SCCIC) Institut Teknologi Bandung (ITB). Pj. Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, memaparkan komitmen Pemkot Malang untuk menerapkan prinsip-prinsip Kota Cerdas sebagai pendekatan pembangunan daerah, dengan penekanan pada kecerdasan kota yang harus dibangun secara utuh, bersama-sama, dan dari hulu hingga hilir. Payung kebijakan pengembangan UKM di Kota Malang melibatkan berbagai inisiatif, termasuk upaya untuk meningkatkan literasi pelaku usaha melalui program Payung Bisnis Brawijaya (PBB). Selain itu, implementasi smart city di Kota Malang juga dinaungi oleh payung kebijakan untuk perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

Pemkot Malang memastikan bahwa *masterplan smart city* telah diberikan payung hukum melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 43 Tahun 2020, dengan substansi Kota Cerdas masuk dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Dalam konteks ini, Pemkot Malang juga mengalokasikan anggaran spesifik untuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kota Cerdas, termasuk dukungan CSR pada tahun 2022 untuk pembangunan kota. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintah pada penguatan literasi digital oleh semua lapisan

masyarakat, kolaborasi, dan peningkatan tata kelola dan manajemen untuk memberikan layanan infrastruktur dan sistem TIK yang andal, serta membangun ekonomi kreatif dan UMKM melalui inisiatif seperti *Malang Creative Center* (MCC) dan program Kamis Mbois. Harapan Pj. Wali Kota Malang adalah agar pada tahun 2025 Kota Malang dapat menjadi Kota Kreatif Dunia dengan dampak positif bagi perekonomian masyarakat (Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang, 2023).

Oleh karena itu, strategi pengembangan UKM di Kota Malang yang tergabung dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 43 Tahun 2020, dengan fokus pada integrasi Kota Cerdas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dapat diuraikan dalam beberapa aspek kunci. Pertama, integrasi Kota Cerdas dalam RPD 2024-2026 memastikan bahwa pengembangan UKM di Kota Malang bertujuan untuk meningkatkan kinerja kota sebagai wilayah cerdas, dengan pemanfaatan teknologi dan infrastruktur yang mendukung. Kedua, aspek standarisasi mutu menjadi fokus utama, di mana pembinaan terkait penerapan standar mutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas hasil produksi UKM. Ketiga, strategi pengembangan ekonomi kreatif, sesuai dengan prinsip dan langkah-langkah, akan memberikan landasan bagi UKM di Kota Malang untuk berkembang dengan mematuhi standar pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya, strategi ini diharapkan dapat memfasilitasi UKM dalam mengambil manfaat dari pendekatan Kota Cerdas, memungkinkan mereka untuk mengembangkan dan memperluas pasar, mengintegrasikan teknologi, dan mengoptimalkan sistem pendukung usaha. Dengan demikian, strategi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing UKM, dan memajukan industri lokal di Kota Malang.

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang, peran aktif pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, menjadi sangat krusial. Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan dalam memberikan dukungan holistik, meliputi bimbingan, serta pelatihan kepada para pelaku UKM guna meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha. Dukungan ini mencakup pengembangan strategi

pemasaran yang efektif, penguatan manajemen keuangan, serta memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha. Selain itu, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif juga menjadi tanggung jawab kunci pemerintah daerah. Melalui kebijakan yang mendukung, pelibatan aktif dalam membangun jejaring, dan meminimalisir hambatan regulasi, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan usaha yang memberikan peluang bagi UKM untuk bersaing secara sehat dengan pelaku ekonomi lainnya.

UKM di Kota Malang masih menghadapi sejumlah kendala internal, terutama terkait pengetahuan teknologi, pemahaman pasar, dan strategi pemasaran yang terbatas. Selain itu, masalah modal dan sumber daya manusia yang kurang memadai juga menjadi hambatan. Pemerintah Kota Malang telah berupaya mendukung UMKM melalui kebijakan yang mendukung penggunaan produk UKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya lainnya termasuk alokasi dana yang signifikan untuk UKM, klasifikasi pelaku UKM, dan pendampingan khusus dalam manajemen keuangan dan produksi. Dalam mengatasi kendala tersebut, memanfaatkan teknologi informasi, seperti pemasaran online dan komunikasi dengan konsumen melalui berbagai platform, dianggap sebagai langkah yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UKM di Kota Malang.

Indikator Teori Pertumbuhan Bisnis (*Business Growth Theory*) dalam konteks strategi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota Malang mencakup berbagai aspek yang penting untuk pertumbuhan dan kelangsungan bisnis. Akses pasar yang efektif tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memungkinkan UKM memperluas jangkauan bisnis serta mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Kondisi kerja yang baik, termasuk keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan, dapat meningkatkan produktivitas, kesejahteraan karyawan, dan retensi tenaga kerja, mendukung pertumbuhan bisnis. Penerapan teknologi membantu UKM bersaing efektif dengan meningkatkan efisiensi operasional, manajemen inventaris, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Akses informasi yang baik memungkinkan UKM membuat keputusan yang lebih baik, merespons perubahan pasar dengan cepat,



dan mengidentifikasi peluang bisnis baru. Upaya promosi usaha baru yang efektif membantu meningkatkan kesadaran merek, menarik perhatian pelanggan potensial, dan mempercepat adopsi produk atau layanan baru. Peningkatan kualitas produk menjadi strategi penting untuk membangun kepuasan pelanggan, reputasi bisnis yang baik, dan mendukung loyalitas pelanggan. Integrasi yang baik dari kelima faktor ini menjadi kunci bagi pertumbuhan berkelanjutan UKM dalam lingkungan bisnis yang dinamis, di mana adaptabilitas dan responsivitas terhadap perubahan menjadi esensial untuk mencapai kesuksesan jangka panjang (Shobaruddin, 2020).



**Gambar 1. 1 Presentase Berbagai Sektor UMKM Kota Malang Tahun 2022**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, (2022)*

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran strategis yang sangat vital dalam menggerakkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) di kawasan tersebut. Bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan berbagai dukungan dan layanan bagi para pelaku UKM, Dinas ini berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan dan kelangsungan usaha mereka. Dengan menggelar pelatihan mendalam, pendampingan berkelanjutan, fasilitas pembiayaan, serta pengembangan pasar dan perizinan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan secara krusial menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha UKM. Ini memberikan mereka alat yang diperlukan untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin dinamis.

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2021-2022**

Kecamatan di Kota Malang	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kota Malang (Unit)	
	2021 <sup>T1</sup>	2022 <sup>T1</sup>
Kedungkandang	855	1 069
Sukun	1 462	1 478
Klojen	868	875
Blimbing	1 459	1 479
Lowokwaru	2 339	3 019
<b>KOTA MALANG</b>	<b>6 983</b>	<b>7 920</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Malang, 2022*

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang (2022), periode 2021-2022 mencatat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai kecamatan di Kota Malang. Salah satu kecamatan yang mencatat pertumbuhan paling mencolok adalah Lowokwaru. Pada tahun 2021, kecamatan ini memiliki 2,339 unit UMKM, yang kemudian meningkat secara substansial menjadi 3,019 unit pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang positif di daerah tersebut.

Selain itu, Kecamatan Sukun juga mengalami peningkatan yang dapat diperhatikan dalam jumlah UMKM. Dari 1,462 unit pada tahun 2021, jumlahnya naik menjadi 1,478 unit pada tahun 2022. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi ekonomi yang terus berkembang di Sukun, yang dapat menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Malang secara keseluruhan.

Kecamatan lainnya, seperti Kedungkandang, Blimbing, dan Klojen, juga mencatat pertumbuhan positif dalam jumlah UMKM. Dengan kenaikan masing-masing dari 855 menjadi 1,069 unit, 1,459 menjadi 1,479 unit, dan 868 menjadi 875 unit, kecamatan-kecamatan ini turut berkontribusi terhadap perkembangan UMKM di Kota Malang.

Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang pada tahun 2023 memperlihatkan pertumbuhan yang positif dalam sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai kecamatan. Total UMKM di Kota Malang mencapai 7,920 unit pada tahun 2022, mengalami peningkatan yang signifikan dari 6,983 unit pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini memberikan gambaran

potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kontribusi yang semakin besar dari sektor UMKM terhadap perekonomian kota.

**Tabel 1. 3 Data Sektoral Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang 2023**

Data Sektoral				
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				
No.	Jenis Data	Satuan	2023	Produsen Data
1	I. UMKM Perbidang Usaha*	*		Diskopindag
2	1. Jumlah UMKM Bidang Kuliner*	*		Diskopindag
3	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
4	Blimbing	Usaha	3164	Diskopindag
5	Klojen	Usaha	2159	Diskopindag
6	Kedungkandang	Usaha	2329	Diskopindag
7	Sukun	Usaha	2691	Diskopindag
8	Lowokwaru	Usaha	5440	Diskopindag
21	2. Jumlah UMKM Bidang Fashion*	*		Diskopindag
22	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
23	Blimbing	Usaha	260	Diskopindag
24	Klojen	Usaha	245	Diskopindag
25	Kedungkandang	Usaha	194	Diskopindag
26	Sukun	Usaha	240	Diskopindag
27	Lowokwaru	Usaha	232	Diskopindag
40	3. Jumlah UMKM Bidang Pendidikan*	*		Diskopindag
41	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
42	Blimbing	Usaha	8	Diskopindag
43	Klojen	Usaha	5	Diskopindag
44	Kedungkandang	Usaha	4	Diskopindag
45	Sukun	Usaha	0	Diskopindag
46	Lowokwaru	Usaha	16	Diskopindag
59	4. Jumlah UMKM Bidang Otomotif*	*		Diskopindag
60	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
61	Blimbing	Usaha	56	Diskopindag
62	Klojen	Usaha	42	Diskopindag
63	Kedungkandang	Usaha	91	Diskopindag
64	Sukun	Usaha	12	Diskopindag
65	Lowokwaru	Usaha	56	Diskopindag
78	5. Jumlah UMKM Bidang Agrobisnis*	*		Diskopindag
79	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
80	Blimbing	Usaha	4	Diskopindag
81	Klojen	Usaha	0	Diskopindag
82	Kedungkandang	Usaha	32	Diskopindag
83	Sukun	Usaha	2	Diskopindag
84	Lowokwaru	Usaha	3	Diskopindag
97	6. Jumlah UMKM Bidang Teknologi Internet*	*		Diskopindag
98	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
99	Blimbing	Usaha	0	Diskopindag
100	Klojen	Usaha	1	Diskopindag
101	Kedungkandang	Usaha	21	Diskopindag
102	Sukun	Usaha	2	Diskopindag
103	Lowokwaru	Usaha	31	Diskopindag
116	7. Jumlah UMKM Bidang Lainnya*	*		Diskopindag
117	1. Jumlah Usaha Mikro **	**		Diskopindag
118	Blimbing	Usaha	1705	Diskopindag
119	Klojen	Usaha	1346	Diskopindag
120	Kedungkandang	Usaha	1695	Diskopindag
121	Sukun	Usaha	2094	Diskopindag
122	Lowokwaru	Usaha	3482	Diskopindag

*Sumber: Data diolah, 2023*

Pada data sektoral Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Malang pada tahun 2023, terlihat bahwa sektor UKM di berbagai bidang usaha memiliki variasi angka yang menarik. Dalam bidang kuliner, terutama di daerah Blimbing, Sukun, dan Lowokwaru, jumlah usaha mikro mencapai angka yang signifikan, seperti 3164 usaha mikro di Lowokwaru. Meskipun demikian, perhatian lebih perlu diberikan terkait peningkatan kualitas produk dan penerapan standar mutu untuk mendukung daya saing.

Di bidang fashion, terlihat bahwa di beberapa kecamatan seperti Kedungkandang dan Sukun, jumlah usaha mikro masih terbilang rendah, misalnya hanya 194 usaha mikro di Kedungkandang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis untuk mengembangkan dan memberikan dukungan agar sektor ini dapat tumbuh optimal.

Pada sektor pendidikan, terdapat variasi yang mencolok, terutama di Sukun dan Lowokwaru yang memiliki jumlah usaha mikro di bidang pendidikan yang masih kurang optimal, bahkan mencapai 0 usaha mikro di Sukun. Hal ini dapat menjadi peluang untuk merumuskan strategi pengembangan agar sektor ini dapat lebih berkembang. Di bidang otomotif, sektor ini terlihat cukup baik di Kedungkandang dengan jumlah usaha mikro yang relatif tinggi, yaitu 91 usaha mikro.

Sementara itu, bidang agrobisnis di daerah Klojen dan Teknologi Internet di Blimbing dan Sukun menunjukkan potensi yang dapat dioptimalkan lebih lanjut. Perlu perhatian khusus untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh usaha mikro di bidang ini dan menyusun strategi pengembangan yang tepat. Terakhir, dalam bidang lainnya, seperti yang terlihat di Lowokwaru, jumlah usaha mikro cukup tinggi, mencapai 3482 usaha mikro. Namun, perlu ditingkatkan kualitas dan daya saingnya.

**Tabel 1. 4 Realisasi dan capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Tahun 2019 - 2022**

SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI KINERJA				CAPAIAN KINERJA			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen dan stabilitas harga pokok	Koefisien Variasi Harga Bahan Pokok Antar Waktu	-	0.965 %	1.02 %	-2.57 %	-	207 %	196.8 %	257 %
	Prosentase Koperasi Sehat	10.15%	51.85 %	79.24 %	88.55 %	100%	129 %	94.38 %	100 %
	Persentase Pertumbuhan Usaha Kecil	-	44.49 %	5 %	-	-	109.07 %	146.20 %	-
Meningkatnya Kualitas Pasar	Persentase Kenaikan Volume Penjualan Usaha mikro yang difasilitasi Usahanya	-	-	-	0.26%	-	-	-	297%
	Persentase Pasar Halal	-	0 %	11.54 %	15.38 %	-	0%	100%	100%
	Pertumbuhan industri	5.17%	-0,48 %	3.05 %	6.74 %	141%	-12.37 %	448.53 %	207 %

saing industri									
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	78,83	86.10	-	-	97.44 %	106.29 %

*Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, 2022*

Menurut Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, (2022), Diskopindag Kota Malang mencatat omset UKM per bidang usaha dalam kerangka pencapaian sasaran strategis. Pada sasaran strategis pertama, yakni meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan stabilitas harga pokok, omset UKM diukur melalui koefisien variasi harga bahan pokok. Capaiannya sebesar 60.2%, dipengaruhi oleh operasi pasar kerjasama dengan Disperindag Propinsi Jawa Timur dan upaya tindak lanjut dari pengimplementasian PMK No.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Sasaran strategis kedua menitikberatkan pada peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, dengan indikator kinerja utama berfokus pada persentase koperasi sehat dan persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya. Capaian realisasi kinerja tahun 2022 mencapai 100% pada persentase koperasi sehat, meningkat 5.62% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, persentase kenaikan volume penjualan usaha mikro yang difasilitasi usahanya mencapai 297% dari target 0.093%, dengan perubahan indikator kinerja untuk menyesuaikan formula penghitungan berdasarkan Perpu Cipta Kerja.

Sasaran strategis ketiga mengenai meningkatnya pertumbuhan dan daya saing industri menilai capaian kinerja sebesar 6.74%, mengalami kenaikan sebesar 3.69% dari tahun sebelumnya. Perubahan target dilakukan setelah reviu tahun 2022, mengakibatkan kinerja ekonomi yang membaik dengan cepat dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis keempat, yang berfokus pada peningkatan kualitas pasar dengan indikator persentase pasar halal, menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini terjadi karena dilaksanakannya

penyeliaan beberapa komoditi halal di tiga titik lokasi pasar, yakni Pasar Sawojajar, Pasar Bunul, dan Pujasera Sriwijaya.

Terakhir, pada sasaran strategis kelima mengenai meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, nilai SAKIP mencapai peningkatan capaian sebesar 8.85% dibandingkan tahun 2021. Capaian tersebut menandakan peningkatan dalam kualitas pelayanan perangkat daerah, memberikan dampak positif terhadap pencapaian sasaran strategis secara keseluruhan.

Dalam upaya mengakselerasi distribusi pembangunan industri yang merata di seluruh wilayah Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi administratif menjadi 10 Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Penetapan WPI didasarkan pada keterkaitan sumber daya dan fasilitas pendukung ke belakang (backward) dan ke depan (forward), serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Provinsi Jawa Timur mencakup beberapa kabupaten/kota, seperti Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan Bangkalan. Sementara Kawasan Industri (KI) terfokus pada beberapa kawasan di WPPI, seperti Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Jombang, dan Banyuwangi (Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, 2023).

Kota Malang, meskipun tidak termasuk dalam WPPI atau ditetapkan memiliki Kawasan Industri, memiliki potensi untuk mengembangkan industri melalui Kawasan Peruntukan Industri yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang. Kota Malang memiliki peran sebagai penyangga dari WPPI di Provinsi Jawa Timur. Meskipun fokus pembangunan industri di Kota Malang tidak terpusat pada WPPI, namun masih memungkinkan untuk mengembangkan sentra industri kecil dan menengah sesuai dengan amanat Rencana Induk Pengembangan Industri (RIPIN). Dengan potensi pengembangan sentra industri kecil dan menengah di setiap kabupaten/kota, Kota Malang memiliki peluang untuk memajukan sektor industri di tingkat lokal.

Menjalankan peran yang signifikan, Dinas ini menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang terfokus pada peningkatan pengetahuan dan

keterampilan para pelaku UKM. Program-program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan manajemen, pemasaran, keuangan, dan aspek teknis lainnya yang menjadi kunci dalam pengelolaan usaha secara efektif. Melibatkan para pelaku UKM dalam pelatihan dan pendampingan ini, Dinas berupaya memberikan mereka alat yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing, merumuskan strategi yang lebih cermat, dan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam lingkungan bisnis yang dinamis (Asyiah et al., 2022).

Selain itu, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki peran dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi UKM. Mereka berupaya untuk memfasilitasi UKM dalam mendapatkan modal usaha yang dibutuhkan melalui program-program pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini membantu UKM mengatasi kendala permodalan yang sering menjadi hambatan dalam mengembangkan usaha (Sari et al., 2023).

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang tidak hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan pasar bagi Usaha Kecil Menengah (UKM). Mereka aktif berupaya membantu UKM dalam mengakses pasar yang lebih luas serta meningkatkan visibilitas produk mereka. Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi, partisipasi dalam pameran industri, dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait, Dinas ini menjadi motor penggerak yang efektif untuk membantu UKM memperluas jaringan bisnis dan menciptakan peluang baru. Dengan demikian, mereka tidak hanya memberikan dukungan dalam pengembangan keterampilan, tetapi juga berperan aktif dalam membuka pintu kesempatan bagi UKM untuk berkembang dan bersaing secara lebih efektif di pasar yang semakin dinamis.

Selain dukungan operasional, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki peran dalam memfasilitasi perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan UKM. Mereka berperan dalam menyederhanakan proses perizinan, memberikan informasi yang jelas mengenai aturan-aturan yang berlaku, dan menjaga ketaatan UKM terhadap regulasi yang ada (Rizal et al., 2022).

Melibatkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam penelitian



atau studi mengenai UKM di Kota Malang akan memberikan wawasan yang penting mengenai kondisi aktual UKM, tantangan yang dihadapi, serta program-program yang telah dilakukan dan potensinya untuk dikembangkan lebih lanjut. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam mendukung pengembangan UKM, sehingga dapat memberikan pandangan yang berharga dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk memperkuat sektor UKM di Kota Malang.

Dengan melibatkan penelitian mendalam dan analisis strategi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang, diharapkan dapat mengidentifikasi secara menyeluruh faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan UKM. Tujuan utama adalah memahami kebutuhan dan harapan pengusaha UKM di wilayah ini. Melalui penyelidikan ini, diharapkan mampu menciptakan landasan yang kokoh untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif dalam meningkatkan pengembangan UKM di Kota Malang. Dengan demikian, hasil penelitian akan memberikan pandangan yang mendalam tentang kondisi ekonomi lokal, memungkinkan pihak berwenang dan stakeholder terkait untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, strategi yang diterapkan juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang signifikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara menyeluruh.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan informasi sebelumnya, maka rumusan masalah yang diambil adalah “Bagaimana Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang bertindak untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang?”

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap strategi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait dengan strategi yang

telah diimplementasikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, memungkinkan untuk pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan UKM di Kota Malang. Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Dinas tersebut dalam meningkatkan dan menyempurnakan strategi pengembangan UKM, serta memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif di masa depan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademis dan praktis dalam upaya mengembangkan sektor UKM sebagai salah satu pilar ekonomi di Kota Malang. Adapun manfaat penelitian yaitu:

### **1.3.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini membawa manfaat teoritis yang signifikan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pengetahuan tentang strategi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang melalui analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap strategi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Kedua, melalui pemahaman yang lebih baik tentang faktor penghambat dan pendukung dalam pengembangan UKM di Kota Malang, penelitian ini membantu mengidentifikasi tantangan konkret yang dihadapi serta menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan UKM secara efektif. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual tentang strategi pengembangan UKM, yang tidak hanya bermanfaat di Kota Malang tetapi juga dapat digunakan sebagai landasan untuk pengembangan UKM di wilayah lain. Keempat, hasil penelitian memberikan informasi berharga bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait, membantu mereka merumuskan kebijakan dan program yang tepat dalam mendukung pengembangan UKM di Kota Malang. Terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi penting pada literatur ilmiah tentang pengembangan UKM di Indonesia dengan menyajikan temuan dan rekomendasi dari studi kasus di Kota Malang, yang dapat menjadi sumber referensi berharga untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut dalam konteks pengembangan UKM di Indonesia.

### **1.3.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini menghadirkan manfaat praktis yang sangat relevan dalam

berbagai aspek. *Pertama*, hasil riset ini dapat memberikan panduan praktis yang berharga bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang. Dengan menganalisis strategi yang terbukti efektif dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UKM, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi spesifik yang dapat diimplementasikan oleh UKM untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan mereka. *Kedua*, penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi berharga bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendukung UKM. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan UKM, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis kecil dan menengah. *Ketiga*, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti lembaga keuangan dan organisasi pendukung UKM, dengan menyediakan wawasan tentang strategi dan pendekatan yang efektif dalam mendukung perkembangan UKM di Kota Malang. Hal ini secara keseluruhan dapat membantu upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

#### **1.4 Definisi Konseptual**

Dalam penelitian ini, definisi konseptual digunakan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan kategori yang dapat didefinisikan melalui berbagai kriteria yang beragam. Klasifikasi UKM seringkali mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah tenaga kerja, besarnya modal atau investasi, kapasitas produksi, dan volume penjualan dalam periode tertentu. Menurut standar yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UKM dapat diidentifikasi sebagai entitas industri perdagangan dengan jumlah pekerja antara 5 hingga 19 orang. Selain itu, Undang-undang No. 20 tahun 2008 memberikan perspektif tambahan dengan mendefinisikan UKM sebagai peluang usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan, dengan persyaratan harus

memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan undang-undang. Dengan demikian, UKM melibatkan berbagai parameter yang mencakup aspek tenaga kerja, modal, dan karakteristik usaha mikro yang berkontribusi pada keragaman definisi dalam konteks ekonomi dan perundang-undangan di Indonesia. (Slamet & Bintoro, 2019).

#### **1.4.2 Strategi Pengembangan UKM di Kota Malang**

Dalam upaya mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), strategi pengembangan menjadi suatu proses yang melibatkan perencanaan yang cermat terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa mendatang. Strategi di sini mencakup penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dan langkah-langkah konkret beserta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, proses ini melibatkan identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh UKM, melalui analisis mendalam terhadap kondisi pasar, tren industri, serta kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Adapun penerapan strategi pengembangan ini memerlukan pengambilan keputusan yang tepat, pemanfaatan teknologi, pengembangan keterampilan sumber daya manusia, dan usaha untuk meningkatkan daya saing. Dengan demikian, strategi pengembangan menjadi landasan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang UKM di tengah dinamika pasar. (Mihani & Hutauruk, 2020).

#### **1.4.3 Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan**

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan industri kecil dan UKM. Sebagai entrepreneur, mereka dapat membantu mendirikan dan mengelola unit-unit usaha terkait industri kecil dan UKM, menjadi inisiator dan pemimpin dalam mengembangkan usaha-usaha tersebut. Sebagai coordinator, mereka dapat melibatkan kelompok masyarakat dalam pengumpulan informasi ekonomi dan pengevaluasian, untuk memahami kebutuhan dan tantangan industri kecil dan UKM. Sebagai fasilitator, Dinas dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudinal dan memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan, bantuan teknis, serta fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan. Sebagai stimulator, mereka dapat mendorong penciptaan dan

pengembangan usaha dengan tindakan khusus, seperti insentif pajak, bantuan modal, subsidi, dan pengaturan kebijakan yang menguntungkan industri kecil dan UKM (Wahyudi, 2022).

Dalam upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan dapat menerapkan beberapa strategi yang disarankan oleh Sjaifudin. Strategi-strategi tersebut meliputi peningkatan kemampuan finansial dengan menyediakan akses pembiayaan melalui program pendanaan, kerjasama dengan lembaga keuangan, atau penyediaan kredit yang terjangkau. Selanjutnya, pengembangan pemasaran dapat dilakukan dengan meningkatkan akses pasar bagi usaha kecil, melindungi pasar dari persaingan yang tidak sehat, serta menggeser struktur pasar monopoli menjadi persaingan yang sehat. Dinas juga dapat memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, dan program pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi pengusaha dan karyawan industri kecil dan UKM. Terakhir, strategi pengaturan dan pengendalian dilakukan melalui perijinan yang mudah, perencanaan tata ruang yang mendukung pertumbuhan industri kecil dan UKM, serta pembentukan kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengawasan usaha.

### **1.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional untuk strategi pengembangan usaha kecil menengah (UKM) di Kota Malang, berdasarkan studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1.5.1** Klinik Bisnis dioperasionalkan sebagai serangkaian kegiatan pelatihan dan konsultasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada pelaku UKM mengenai manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan aspek-aspek penting lainnya. Ini mencakup penyelenggaraan workshop, sesi konsultasi, dan pemberian panduan praktis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan

pengusaha kecil dan menengah..

**1.5.2** Bantuan Modal dapat dioperasionalkan sebagai bentuk dukungan finansial yang diberikan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang kepada UKM. Ini mencakup berbagai program permodalan seperti OJIR (Obligasi Jangka Istimewa Rakyat) dengan bunga bersaing, pinjaman tanpa agunan, atau program bantuan lainnya yang dapat membantu UKM mengatasi kendala modal, meningkatkan kapasitas produksi, dan merencanakan ekspansi bisnis.

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, pemilihan metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali fakta-fakta yang relevan dan mendalam dari lapangan, menghasilkan analisis yang komprehensif terkait dengan sifat strategi pengembangan UKM. Pendekatan sistematis diterapkan untuk memahami hubungan antara berbagai fenomena yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor kunci yang dapat membentuk kebijakan atau langkah-langkah strategis yang lebih efektif. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks strategi pengembangan UKM di Kota Malang.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai strategi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Pemilihan pendekatan kualitatif dilakukan dengan tujuan utama memberikan gambaran yang sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara menyeluruh sifat dan dinamika strategi yang diterapkan oleh UKM di Kota Malang. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nuansa dan konteks yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif, memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang tantangan,

peluang, dan faktor-faktor kualitatif yang memengaruhi keberhasilan strategi pengembangan UKM. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif menjadi instrumen yang efektif dalam merinci aspek-aspek kompleks dari strategi pengembangan UKM di konteks lokal Kota Malang.

### **1.6.2 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Melalui wawancara dengan petugas atau pejabat terkait, peneliti berusaha memahami pandangan dan pengalaman mereka terkait strategi pengembangan UKM. Observasi dilakukan untuk secara langsung mengamati kegiatan dan dinamika strategi di lapangan. Penggabungan data primer tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terkait strategi pengembangan UKM di Kota Malang. Sebagai pelengkap, data sekunder yang mencakup dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait juga digunakan. Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terkait langsung dengan penelitian, seperti laporan kegiatan, rencana strategis, dan data statistik yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Dengan menggabungkan data sekunder dengan data primer, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis menyeluruh tentang strategi pengembangan UKM di Kota Malang, mencakup berbagai sudut pandang baik dari internal maupun eksternal.

### **1.6.3 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang holistik dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penggunaan wawancara sebagai instrumen utama bertujuan mendapatkan informasi langsung dari responden, seperti petugas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Observasi di lapangan digunakan untuk mengamati dinamika strategi yang tengah berjalan, sementara teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen resmi dan

rencana strategis. Gabungan ketiga teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data yang komprehensif, memberikan dukungan analisis yang mendalam terkait strategi pengembangan UKM di Kota Malang. Teknik observasi, baik yang bersifat partisipatif maupun non-partisipatif, memberikan peluang untuk mengamati berbagai kegiatan di Dinas tersebut, dengan tujuan memperoleh informasi terperinci mengenai pelaksanaan strategi pengembangan UKM. Sementara itu, teknik studi dokumen memberikan kontribusi integral dengan melakukan analisis mendalam terhadap dokumen resmi, laporan kegiatan, dan rencana strategis. Dengan demikian, penelitian ini dapat memahami secara menyeluruh dan seimbang konteks serta dampak strategi pengembangan UKM di Kota Malang, membentuk dasar yang solid untuk analisis holistik dan berdasarkan bukti.

#### **1.6.1 Teknik Analisis Data**

Data yang dianalisis dalam kerangka penelitian ini mencakup informasi terkait dengan strategi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang, terutama yang berkaitan dengan pembahasan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Data tersebut mencakup laporan kegiatan, rencana strategis, dokumen resmi, serta informasi statistik terkait perkembangan UKM. Proses analisis data dilakukan dengan menerapkan model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data melibatkan penyortiran dan pengorganisasian data yang relevan, sementara tahap penyajian data mencakup visualisasi data melalui tabel, grafik, dan diagram untuk mempermudah pemahaman. Tahap penarikan kesimpulan melibatkan interpretasi hasil analisis, memungkinkan peneliti untuk menyusun temuan yang bermakna dan merumuskan kesimpulan yang dapat diandalkan terkait dengan strategi pengembangan UKM di Kota Malang. Dengan pendekatan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait efektivitas serta dampak strategi pengembangan UKM di wilayah tersebut. (Rijali, 2018).